

Nama : Wayan Sintia Dewi

NPM : 2213031083

Kelas : 2022C

Matkul: Ekonomi Industri

1. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan *Making Indonesia 4.0* dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.
2. Bandingkan pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?
3. Berdasarkan hasil analisis Anda, rancanglah kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini. Menjelaskan rasional dan instrumen kebijakan yang digunakan.

Jawaban:

1. Kegagalan implementasi kebijakan *Making Indonesia 4.0* dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas dapat dipahami melalui berbagai teori kebijakan industri. Pertama, menurut Rodrik (2004), kebijakan industri yang efektif harus fokus pada aktivitas yang memiliki eksternalitas signifikan, bukan hanya pada sektor tertentu. Namun, *Making Indonesia 4.0* lebih menekankan pada pemilihan lima sektor prioritas tanpa memastikan bahwa kegiatan di dalamnya memberikan efek spillover yang luas. Hal ini membuat insentif dan dukungan yang diberikan tidak menghasilkan dampak berantai yang kuat pada perekonomian. Kedua, teori kegagalan pasar dan institusi dari Lall (2003) dan Stiglitz (1996) menekankan pentingnya kebijakan industri untuk mengatasi kendala seperti risiko teknologi, koordinasi antar pelaku, dan keterbatasan kapasitas. Sayangnya, kebijakan ini belum mampu menyelesaikan hambatan dasar seperti biaya logistik, keterbatasan energi, dan minimnya integrasi dengan rantai pasok global.
Selain itu, dari perspektif teori tahapan industrialisasi (Amsden, 1989), pembangunan industri umumnya harus melalui fase padat karya, kemudian industri dasar (basic industries), sebelum beralih ke industri berteknologi tinggi. Indonesia justru mencoba melakukan lompatan langsung ke adopsi teknologi 4.0 tanpa memperkuat tahapan dasar, sehingga kesiapan industri dan tenaga kerja menjadi lemah. Konsep koordinasi pemerintah-swasta yang ditekankan oleh pengalaman Korea Selatan dan Taiwan juga kurang dijalankan di Indonesia. Menurut teori ini, keberhasilan industrialisasi terjadi ketika pemerintah berperan sebagai fasilitator, penyedia insentif bersyarat, dan penjaga koordinasi investasi. Dalam kasus Indonesia, koordinasi lintas kementerian yang lemah serta insentif yang sering bersifat ad-hoc menunjukkan kurangnya konsistensi kebijakan. Dengan demikian, berdasarkan teori-teori kebijakan industri, penyebab utama kegagalan *Making Indonesia 4.0* adalah kurang tepatnya fokus kebijakan, lemahnya perencanaan tahapan industrialisasi, terbatasnya mekanisme insentif berbasis evaluasi, serta minimnya kolaborasi pemerintah dengan pelaku usaha dan investor.
2. Jika dibandingkan dengan negara lain, pendekatan kebijakan industri Indonesia melalui *Making Indonesia 4.0* belum seefektif Vietnam dan Korea Selatan. Vietnam berhasil

mendorong pertumbuhan industri dengan strategi yang jelas dan konsisten, yaitu membuka diri terhadap investasi asing langsung, membangun kawasan ekonomi khusus, serta berorientasi pada ekspor. Strategi ini membuat Vietnam cepat terintegrasi dalam rantai pasok global dan mampu menarik perusahaan besar seperti Samsung yang membawa dampak besar terhadap sektor elektronik dan tekstil. Sementara itu, Korea Selatan menekankan peran aktif pemerintah dalam mengkoordinasikan pembangunan industri melalui dukungan kredit murah, proteksi selektif, serta kebijakan yang konsisten untuk memperkuat perusahaan nasional. Hasilnya, industri Korea Selatan berkembang pesat dan mampu bersaing di pasar global. Sebaliknya, kebijakan industri Indonesia masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, insentif yang bersifat sementara dan tidak terarah, serta keterbatasan dalam menarik investasi berkualitas. Perbedaan utama dengan Vietnam dan Korea Selatan terletak pada konsistensi strategi dan kedalaman implementasi. Vietnam unggul dalam menarik investasi asing dan memanfaatkan peluang globalisasi, sedangkan Korea Selatan berhasil melalui koordinasi domestik yang kuat. Indonesia justru belum berhasil menerapkan salah satu pendekatan tersebut secara konsisten, sehingga pertumbuhan industri prioritas dalam *Making Indonesia 4.0* masih belum signifikan.

3. Untuk keluar dari jebakan deindustrialisasi dini, Indonesia memerlukan kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual dan menyentuh persoalan mendasar. Langkah pertama adalah memperkuat fondasi industri dengan menurunkan biaya logistik, memperluas infrastruktur transportasi dan energi, serta menyediakan kawasan industri yang siap pakai sehingga investor tidak terbebani hambatan awal. Selanjutnya, strategi menarik investasi asing perlu diarahkan pada perusahaan yang dapat membangun rantai pasok lokal melalui kewajiban transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan peningkatan kandungan lokal. Kebijakan ini harus diimbangi dengan program penguatan usaha kecil dan menengah sebagai pemasok, misalnya melalui dukungan sertifikasi mutu, akses pembiayaan, dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dengan memperkuat pendidikan vokasi, program magang, dan kolaborasi dengan dunia usaha agar keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri modern. Dari sisi insentif, pemerintah perlu memberikan fasilitas fiskal dan pembiayaan secara selektif dan bersyarat, disertai evaluasi kinerja secara berkala untuk menghindari praktik rente. Koordinasi antar lembaga juga harus ditingkatkan melalui badan khusus yang fokus pada pelaksanaan kebijakan industri sehingga kebijakan lebih konsisten dan tidak tumpang tindih. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Indonesia dapat memperbaiki daya saing, meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap perekonomian, serta mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan.